

332 Industri Jadi Tujuan Investasi PPS

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan 332 kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) dan sektor energi terbarukan yang bisa dipilih sebagai tujuan investasi untuk harta bersih pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. Harta yang diinvestasikan tersebut akan memperoleh hak istimewa berupa tarif pajak yang paling rendah.

Oleh Triyan Pangastuti



Neilmaldrin Noor

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.010/2022 tentang Kegiatan Usaha Sektor Pengolahan Sumber Daya Alam dan Sektor Energi Terbarukan Sebagai Tujuan Investasi Harta Bersih Dalam Rangka Pelaksanaan PPS.

"KMK-52/KMK.010/2022 terbit untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor dalam siaran pers, Selasa (1/3).

Ia mengatakan, investasi pada hilirisasi sumber daya alam dan sektor energi terbarukan merupakan alternatif investasi PPS, selain surat berharga negara (SBN) yang mendapat hak istimewa kebijakan tarif terendah PPS.

Adapun 332 kegiatan usaha yang ada dalam KMK-52/KMK.010/2022 diantaranya perusahaan tenaga panas bumi, industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas, industri pengasapan/pemanggangan ikan, industri pengolahan rumput laut, industri minyak mentah kelapa sawit (CPO), industri batu bata dari tanah liat/keramik, industri mesin pembangkit listrik, industri furnitur dari kayu, serta aktivitas pengembangan video game.

Neilmaldrin mengingatkan wajib pajak peserta PPS yang berkomitmen melakukan investasi, baik pada SBN maupun hilirisasi SDA/sektor energi terbarukan, dilakukan paling lambat 30 September 2023. Adapun holding period atau lamanya investasi paling singkat 5 tahun sejak diinvestasikan.

"Sesuai dengan PMK-196/PMK.03/2021, investasi PPS harus dilakukan paling lambat 30 September 2023. Saat ini, investasi PPS sangat penting nilainya sebagai sumber investasi baru untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional," ujarnya.

Ketentuan lainnya terkait investasi PPS

Januari, Kunjungan Wisman Turun 12,15%

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Januari 2022 mencapai 143,74 ribu kunjungan atau turun 12,15% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. "Namun, kalau kita lihat secara tahunan ini masih mengalami peningkatan sebesar 13,62%," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam telekonferensi pers, di Kantor BPS, Selasa (1/3).

Jumlah kunjungan wisman pada Januari 2022 terdiri atas wisman yang berkunjung dengan moda angkutan udara sebanyak 14,56 ribu kunjungan (10,1%), moda angkutan laut 34,80 ribu kunjungan (24,2%), dan moda angkutan darat 94,39 ribu kunjungan (65,7%). Kunjungan wisman dengan moda angkutan udara melonjak sebesar 740,84% dibandingkan Januari 2021. Kenaikan tajam tercatat di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, sebesar 1.036,75% (dari 1.238 menjadi 14.073 kunjungan), Bandara Halim Perdana Kusuma, DKI Jakarta dan Bandara Sam Ratulangi, Sulawesi Utara, juga mencatat kenaikan masing-masing sebesar 60% dan 7,62%.

Sedangkan jumlah kunjungan wisman dengan moda angkutan laut turun 7,62% dibandingkan dengan Januari 2021. Penurunan tajam tercatat di Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali, sebesar 62,5%, disusul Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau sebesar 7,69%.

Jika dibandingkan dengan Desember 2021, jumlah kunjungan wisman pada Januari 2022 dengan moda angkutan laut juga mengalami penurunan sebesar 11,3%. Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mencatat penurunan tertinggi sebesar 45,45%. Sementara Pelabuhan Tanjung Uban, Kepulauan Riau mencatat kenaikan kunjungan wisman yang cukup tinggi, yaitu sebesar 120,78%.

Selanjutnya, jumlah wisman yang berkunjung dengan moda angkutan darat pada Januari 2022 naik 8,35% dibandingkan Januari 2021. Lonjakan tajam tercatat di pintu masuk Atambua, Nusa Tenggara Timur, sebesar 5,750% (dari 4 menjadi 234 kunjungan). Sementara jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman dengan moda angkutan darat pada Januari 2022 mengalami penurunan sebesar 11,45%. Namun, kunjungan wisman tercatat di pintu masuk Atambua, Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sebesar 27,17% dibandingkan bulan sebelumnya.

Setianto mengatakan, bila dilihat dari negara asal wisman yang berkunjung ke Indonesia pada Januari 2022 didominasi wisman berkebangsaan Timor Leste sebanyak 76,5 ribu kunjungan (53,22%), diikuti wisman berkebangsaan Malaysia 42 ribu kunjungan (29,21%), Tiongkok 3,4 ribu kunjungan (2,36%), Papua Nugini 3,0 ribu kunjungan (2,1%), dan Amerika Serikat 1,8 ribu kunjungan (1,22%). Dengan kondisi jumlah kunjungan wisman tersebut, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Januari 2022 mencapai 42,43%. TPK tertinggi tercatat di Kalimantan Timur sebesar 60,78%, diikuti Yogyakarta dan DKI Jakarta masing-masing sebesar 59,9% dan 52,26%. Sementara Sulawesi Barat tercatat sebagai provinsi dengan TPK terendah, yaitu 11,86%.

"Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, TPK hotel klasifikasi bintang pada Januari 2022 mengalami penurunan sebesar 9,14 poin. Namun kalau dilihat secara tahunan masih mengalami peningkatan sebesar 12,08 poin," kata Setianto. (ark)

adalah untuk wajib pajak yang telah menempatkan investasi di salah satu jenis investasi, baik pada SBN maupun salah satu di atas, diberikan kemudahan untuk dapat berpindah antarinvestasi. Syaratnya, perpindahan investasi ke bentuk lain dilakukan setelah minimal 2 tahun, maksimal 2 kali dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender. Perpindahan investasi diberikan maksimal jeda 2 tahun yang menengguhkan holding period.

"Investasi tidak harus 5 tahun dalam satu jenis investasi, tetapi bisa setelah 2 tahun pindah. Misalnya, sudah investasi di sektor energi terbarukan, setelah 2 tahun pindah ke SBN atau hilirisasi sumber daya alam. Ini murni bisnis. Jadi, investor bisa menentukan mana yang paling menguntungkan," imbuhnya. Neilmaldrin mengajak wajib pajak untuk mengikuti program PPS dan berinvestasi di dalam negeri. Wajib pajak yang menginvestasikan har-

tanya akan mendapatkan tarif pajak penghasilan (PPh) final terendah yang ada di dalam PPS. "Investasi sangat penting untuk mewujudkan tujuan ekonomi Indonesia jangka menengah-panjang. Dengan investasi, kita dapat mendorong kinerja ekonomi nasional serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari dinamika global," ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan situs resmi DJP, Selasa (1/3), negara telah mengantongi penerimaan pa-

jak penghasilan (PPh) final sebesar Rp 2,23 triliun dari PPS. Setoran ini berasal dari harta bersih yang diungkapkan wajib pajak sebesar Rp 21,50 triliun, dengan jumlah pengikut sebanyak 17.944 wajib pajak.

Deklarasi dalam negeri dan repatriasi yang dilakukan wajib pajak sebesar Rp 18,80 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1,36 triliun, serta dana yang diinvestasikan ke instrumen surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 1,34 triliun.



PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Table with 4 columns: ASET, 31 Desember 2021/December 31, 2021, 31 Desember 2020/December 31, 2020, and ASSETS. Rows include ASET LANCAR, ASET TIDAK LANCAR, and TOTAL ASET.

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As of December 31, 2021 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Table with 6 columns: LIABILITIES DAN EKUITAS, 31 Desember 2021/December 31, 2021, 31 Desember 2020/December 31, 2020, and LIABILITIES AND EQUITY. Rows include LIABILITIES JANGKA PENDEK, LIABILITIES JANGKA PANJANG, EKUITAS, and TOTAL LIABILITIES DAN EKUITAS.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Table with 4 columns: Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31, 2021, 2020, and other comprehensive income. Rows include PENJUALAN NETO, LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN, LABA TAHUN BERJALAN, and TOTAL.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Table with 4 columns: Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31, 2021, 2020, and CASH FLOWS. Rows include ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI, ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN, and KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN.

Catatan:

Laporan keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk ('Perusahaan') dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja ('PSS'), firma anggota Ernst & Young Global Limited, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasi.

Notes:

The financial information above was derived from consolidated financial statements of PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk ('Company') and its subsidiaries as of December 31, 2021 and for the year then ended, which was audited by Public Accounting Firm Purwanto, Sungkoro & Surja ('PSS'), a member firm of Ernst & Young Global Limited, an independent auditor, in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants, who expressed unmodified opinion.